

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Demak

Halaman 25

DPRD Pertanyakan Silpa Tinggi

DEMAK - Sejumlah fraksi di DPRD Demak, menyangkan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBD 2017, sebesar Rp 124,5 miliar. Silpa yang tinggi tersebut, secara tidak langsung merugikan masyarakat karena hal itu berarti ada penundaan realisasi sejumlah pembangunan.

Sikap fraksi tersebut mengemukakan dalam rapat paripurna DPRD ke-21, tentang pandangan umum fraksi-fraksi, terhadap raperd pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Demak 2017, di ruang paripurna DPRD Demak, Jumat (6/7).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet, dihadiri Bupati Muham-

mad Natsir, forkopimda dan para anggota DPRD Demak.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Demak, Yudo Astiko, mengatakan besarnya sisa anggaran tersebut menunjukkan kinerja Pemkab Demak belum optimal. Seharusnya semua program bisa dilaksanakan, karena sudah melalui tahapan perencanaan yang matang.

"Kami patut menyangkan adanya sisa anggaran yang sebesar itu, sebab silpa yang tinggi menunjukkan ada program yang tidak terealisasi," katanya.

Beri Apresiasi

Tetapi FPG juga mengapresiasi keberhasilan Pemkab Demak, mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Menurutnya, penilaian WTP bukan berarti pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sempurna dan terbebas dari sikap kritis legislatif. Karena pertanggungjawaban APBD masih menyisakan persoalan yang perlu dikritisi seperti silpa dan adanya piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan, yang nilainya tinggi, yakni sebesar Rp 16 miliar lebih.

Pendapat senada disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pem-

angunan (FPPP), FKB, Gerindra, Fraksi Amanat Demokrasi, dan FPDIP.

Ketua FKB, Ghozali, berharap agar prestasi WTP dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Mengingat opini WTP merupakan kewajiban semua pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan yang diemban.

Sementara itu anggota Fraksi PPP, Arifin mengatakan pelaporan keuangan dan aset yang telah memperoleh penilaian opini tanpa pengecualian harus pula dibarengi dengan hasil kerja pembangunan yang dapat dirasakan oleh rakyat.

"Seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang harus ditingkatkan, pemeliharaan saluran irigasi serta sarana lain yang menjadi kebutuhan masyarakat," katanya. (H1-42)